

SEJARAH SINGKAT JAKARTA

Asal-usul Jakarta berdasarkan Prasasti Tugu pada abad ke-5 Masehi menjelaskan bahwa Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara membuat saluran Candrabaga dan Gomati untuk mengatasi banjir dan irigasi pertanian yang mana daerah di sekitar Kampung Tugu Jakarta menjadi daerah pertanian pada waktu itu. Kemudian Prasasti Batu tulis di Bogor menjelaskan tahun 1333 Masehi telah berdiri Kerajaan Pajajaran dan Pelabuhan Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran serta Sungai Ciliwung menjadi jalur transportasi air yang sangat penting.

Pada tanggal 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian dagang antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis sehingga memberikan kebebasan Portugis dalam berdagang di Sunda Kalapa. Sebagai gantinya, maka Portugis membantu mempertahankan serangan dari luar Kerajaan Pajajaran.

Pada tahun 1527, Portugis kembali ke Sunda Kalapa untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut, tetapi Sunda Kalapa telah dikuasai oleh tentara Kerajaan Demak dibawah pimpinan Faletihan. Pada tanggal 22 Juni 1527, Faletihan dapat mengalahkan dan mengusir Portugis dari Sunda Kalapa dan mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna.

Pada tanggal 13 November 1596, armada kapal kongsi dagang Belanda (VOC) pertama merapat di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada waktu itu, Jayakarta dipimpin Pangeran Wijayakrama atau dikenal dengan nama Pangeran Jayakarta. Pada Oktober 1618, VOC membuat loji di Sunda Kelapa yang selanjutnya mendirikan benteng untuk memperkuat pertahanannya, sehingga memicu kemarahan penguasa lokal sehingga terjadi penyerangan terhadap VOC oleh pasukan Jayakarta dibantu oleh kongsi dagang Inggris (EIC) yang berhasil mengusir Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen dengan sebagian besar pasukannya ke Ambon.

Pada tanggal 28-30 Mei 1619, Jan Pieterzoon Coen kembali ke Jayakarta bersama armada bantuan dari Ambon menyerang dan membumihanguskan Keraton Jayakarta, kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Selanjutnya Jan Pieterzoon Coen menjadikan Batavia sebagai pusat kongsi dagang Belanda (VOC).

Pada tanggal 4 Maret 1621, dibentuklah Pemerintah Stad Batavia (Kota Batavia) dan pada awal abad ke-18, Kota Batavia berada pada masa kejayaan sehingga mendapat julukan Ratu dari Timur yang ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan megah dan bersejarah yang hingga saat ini masih ada seperti Museum Sejarah Jakarta yang pernah digunakan sebagai Gedung Balaikota Batavia dan Museum Bahari Jakarta yang pernah digunakan sebagai gudang rempah-rempah.

Pada tanggal 1 April 1905 nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia, sebutan untuk daerah kota praja yang mengurus pengelolaan kota Batavia.

Kemudian, ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, nama Gemeente Batavia diubah menjadi Jakarta Tokubetsu Shi, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1942 melalui maklumat Gunseikan (kepala pemerintahan militer Jepang) untuk menarik simpati orang Indonesia agar mendukung Jepang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk Soewirjo sebagai Wali Kota Djakarta Raya pertama pada tanggal 23 September 1945.

Pada tahun 1948 ketika Jakarta sepenuhnya dikuasai oleh NICA, Presiden Sukarno menunjuk Daan Jahja sebagai Gubernur Militer Jakarta. Pada saat itu, NICA menggunakan nama Batavia sebagai pengganti Jakarta. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949, Menteri Penerangan RIS, Arnold Mononutu menegaskan bahwa sejak 30 Desember 1949 nama Batavia berganti menjadi Jakarta.

Pada tanggal 23 Februari 1956, melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raya 6/D/K/1956 bahwa tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai Hari Kelahiran DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 1964, Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pembangunan Kota Jakarta pada awal negara Indonesia berdaulat sepenuhnya, dimulai pada masa Walikota Sjamsulridjal ditandai dengan banyaknya rumah sakit di berbagai wilayah Jakarta, penjernihan air minum Pejompongan, pembangunan Jalan Thamrin dan Mesjid Kebayoran Baru.

Perkembangan pembangunan Kota Jakarta pada masa berikutnya dilakukan oleh Walikota Syamsuridjal, Walikota Sudiro, Gubernur Sumarno Sastroatmodjo, Gubernur Hendrik Joel Hermanus Ngantung, Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Tjokropranolo, Gubernur R. Soeprapto, Gubernur Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Surjadi Soedirja, Gubernur Sutiyoso, Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Anies Rasyid Baswedan, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, Jakarta telah mensejajarkan dirinya dengan kota-kota megapolitan yang diakui di level internasional dengan dijadikannya Jakarta sebagai tuan rumah Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Keketuaan ASEAN. dalam bidang pelayanan public melakukan optimalisasi pelayanan dan Pembukaan Kembali Pos Pengaduan di Balaikota dan Kecamatan-kelurahan, dalam bidang kemitraan membangun koneksitas dan konsolidasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga seperti Kementerian PUPR, BUMN, Perhubungan, Perdagangan serta Instansi terkait, Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat serta DPRD DKI Jakarta menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal pembangunan fisik ditandai dengan penataan kawasan kurang terawat di setiap kelurahan menjadi kawasan unggulan; penataan kawasan menjadi lahan hijau; percepatan penyelesaian sodetan dan normalisasi Kali Ciliwung untuk pengendalian banjir, penataan dan penciptaan Ruang Terbuka Hijau baru di seluruh wilayah DKI Jakarta dan optimalisasi urban farming.

Berbagai penghargaan telah diperoleh Pemerintah DKI Jakarta, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti: Mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia untuk yang ke-enam kalinya secara berturut-turut; mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2023 dari Kementerian Dalam Negeri RI; Juara Umum (Platinum Award) untuk kategori Pemerintah Provinsi pada ajang Public Relations Indonesia Awards 2023 dan 8 penghargaan terbaik lainnya; memperoleh enam dari sepuluh kategori penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah; Mendapatkan empat kategori terbaik pada penghargaan BAZNAS Award Tahun 2023;

Dalam bidang pelayanan publik, untuk ketiga kalinya Jakarta kembali meraih penghargaan internasional dalam World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2023, yang diadakan International Telecommunication Union, sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Jakarta terus berupaya menjadi kota maju dunia, sebagai unsur terdepan kemajuan Negara yang selalu siap bekerja sama secara nasional dan internasional. Jakarta dengan pengalamannya sebagai Ibukota Negara terus merepresentasikan miniatur keberlimpahan dan menjadi berkah bagi seluruh daerah di Indonesia dan berhubungan harmonis dengan berbagai elemen pemerintah pusat. Selanjutnya dengan segala sumber daya yang dimilikinya, Jakarta turut mengantar dan menyukseskan perpindahan Ibukota Negara, hingga terwujud Cita Provinsi "Sukses Jakarta untuk Indonesia"

Jakarta, 22 Juni 2023